

DOKUMEN PERENCANAAN

**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

RENJA PERUBAHAN Tahun 2019



Pemerintah Kabupaten Bone Bolango

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayahNya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019 ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bone Bolango 2016-2021 dan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021.

Dalam Penyusunan Rencana kerja ini, masih terdapat beberapa kendala kendala yang di hadapi namun berkat ketekunan semua staf akhirnya semua kendala dapat di atasi dan penyusunan Rencana Kerja ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang di tentukan. Kami menyadari dokumen ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.-

Terima Kasih

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN BONE BOLANGO**



DUMAIDIL AP, Mec. Dev
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19741018 199311 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1	LATAR BELAKANG
------------	-----------------------

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan ini di laksanakan dalam rangka Pembangunan Daerah yang memanfaatkan sumber daya yang di miliki untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya asing maupun peningkatan indeks Pembangunan manusia.

Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah proses penyusunan tahapan tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka tertentu. Berdasarkan undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional, Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pada tingkatan SKPD dilakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk periode satu yang dinamakan Rencana Kerja (RENJA) – SKPD sebagai langkah strategis untuk mewujudkan hasil hasil pembangunan yang diinginkan dalam perencanaan jangka menengah. Rencana Kerja (RENJA) SKPD ini menerjemahkan Perencanaan strategis lima Tahunan yang dituangkan dalam RENSTRA SKPD ke dalam Perencanaan Tahunan yang sifatnya lebih Operasional. Perencanaan Pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan , responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Rencana SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai Implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah . Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango tahun 2019 di susun dalam rangka mengimplementasikan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Bone Bolango Periode 2016 – 2021 dengan memperhatikan hasil yang telah di capai, kebijakan Pemerintah Pusat , Kebutuhan kebutuhan

masyarakat dan Pemangku kepentingan dan perubahan lingkungan strategis.

Kualitas Dokumen Renja sangat di tentukan oleh kualitas Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang akan di laksanakan sehingga Penyusunan Renja SKPD sangat di tentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplemntasikan , mengandalikan dan mengevaluasi capaian Program dan Kegiatan sesuai Tugas pokok dan Fungsi SKPD

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Pemebentukan Provinsi ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang – undang Nomor 33 Taahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah ;
5. Undang – undang Nomor 17 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan , Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2009 2014 ;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 221) ;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
10. Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

11. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango ;

1.3	MAKSUD DAN TUJUAN
------------	--------------------------

Rencana Kerja 2018 di susun dengan maksud : (1) sebagai acuan dasar bagi Dinas Perencanaan Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara lebih terencana, terarah dan terkendali serta dinamis dalam mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi (2) sebagai pedoman dalam upaya peningkatan investasi dan (3) sebagai instrumen untuk pemantauan dan evaluasi kinerja organisasi.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango 2018 yaitu : 1) Meningkatkan kinerja institusi dan pegawai, 2) Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan , pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi program serta kegiatan dan 3) Meningkatkan sinkronisasi program peningkatan investasi antar institusi dan antar pemerintahan Pusat Provinsi, dan kabupaten / Kota.

1.4	SISTEMATIKAN PENULISAN
------------	-------------------------------

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD 2018 dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
- C. Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
- D. Telaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan

- A. Kebijakan Strategis
- B. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
- C. Program Dan Kegiatan

Bab IV Penutup

Kesimpulan Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA TAHUN 2018

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP&TK TAHUN LALU

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango adalah Penjabaran Perencanaan Tahunan dan Rencana Strategis yang mengacu pada Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu dan Tenaga Kerja. Tercapainya tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau Program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pencapaian Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango 2018 dapat dijadikan tolak ukur dalam menentukan dan melaksanakan Renja Tahun kedepan dengan mengevaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun lalu. Pengukuran Kinerja Kegiatan dan pengukuran Kinerja Sasaran melalui Tahapan sebagai berikut :

- a. Penetapan Indikator Kinerja
Penetapan Indikator Kinerja merupakan ukuran Kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja kegiatan meliputi Indikator Masukan (inputs), Keluaran (outputs), hasil (outcomes), Manfaat (Benefit) dan Dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikatornya. Penetapan Masing masing jenis Indicator yang telah ditetapkan.
- b. Capaian Analisis Kinerja
Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggambarkan Indikator Kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango pada Tahun 2018 ditentukan dari hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Renja Tahun 2018. Adapun Program dan

Kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai pagu Anggaran yang ditetapkan Tahun 2018

1. Program : Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
 Kegiatan : - Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran
 - Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Keluar Daerah
 Anggaran : - Rp. 563.776.000,-
 Realisasi : - Rp. 451.559.334,-
 Prosentasi : - 80%
2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 Kegiatan : - Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional
 - Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan /Peralatan Gedung kantor
 Anggaran : - Rp. 229.180.000,-
 Realisasi : - Rp. 196.220.556,-
 Prosentase : - 86%
3. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 Kegiatan : - Pendidikan dan Pelatihan Formal
 Anggaran : - Rp. 110.000.000,-
 Realisasi : - Rp. 109.484.542,-
 Prosentase : - 99%
4. Program : Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 Kegiatan : - Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
 Anggaran : - Rp. 27.650.000,-
 Realisasi : - Rp .23.570.000,-
 Prosentasi : - 85.25%
5. Program : Progam Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 Kegiatan : - Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
 - Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMND/PMA

	- Penyelenggaraan pameran investasi
Anggaran :	- Rp. 367.186.000,-
Realisasi :	- Rp. 354.480.837,-
Prosentasi :	- 97%
6. Program :	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Kegiatan :	- Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal
Anggaran :	- Rp. 323.699.000,-
Realisasi :	- Rp. 224.543.362,-
Prosentasi :	- 69.37%
7. Program :	Peningkatan Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
Kegiatan :	- Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja
Anggaran :	- Rp. 41.675.000,-
Realisasi :	- Rp. 41.500.000,-
Prosentasi :	- 99.59%
8. Program :	Peningkatan Kesempatan Kerja
Kegiatan :	- Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan berbasis masyarakat
Anggaran :	- Rp. 878.880.000,-
Realisasi :	- Rp. 476.106.919,-
Prosentasi :	- 51.18%
9. Program :	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Kegiatan :	- Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
	- Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Anggaran :	- Rp. 3.621.954.000,-
Realisasi :	- Rp. 2.877.177.800,-
Prosentasi :	- 70.44%

Pada Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango mendapatkan Alokasi Anggaran APBD Belanja Langsung sebesar Rp.....- Anggaran tersebut dialokasikan untuk mempunyai 9 Program dan 13 Kegiatan Dari jumlah dana tersebut

terrealisasi saat ini sebesar Rp.....,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar%.

Untuk hasil evaluasi capaian Renja DPMPTSP&TK Kabupaten Bone Bolango dapat di lihat pada ***Tabel 1. Evaluasi Pelaksanaan Kinerja SKPD (Terlampir)***

2.2	ANALISIS KINERJA PELAYANAN DPMPTSP&TK KABUPATEN BONE BOLANGO
------------	---

Tuntutan penyelenggaraan Pelayanan Publik yang berkualitas saat ini telah menjadi komitmen bersama ,hal ini tidak berlebihan karena sesuai dengan amanat undang – undang Dasar 1945 , Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam kerangka Pelayanan Publik.-

Dalam Upaya meningkatkan kualitas dan Jaminan penyediaan pelayanan publik ini lahirlah terobosan-terobosan berbentuk peaturan Perundangan . Sebagai Contoh disahkannya Undang - Undang No.25 Tahun 2009 tentang Palayanan Publik. Demikian hanya terobosan dalam upaya Peningkatan Pelayanan Publik terkait Investasi. Pemerintah Pusat telah mengeluarkan beberapa peraturan terkait Pelayanan Perijinan Usaha Seperti Inpres No.3 Tahun 2006 tentang paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi,Peraturan Menteri Dalam Negeri No.24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang penanaman Modal . Bahkan pada Tahun 2010 ditandatangani Surat Edaran bersama 3 (Tiga) Menteri yakni Menteri Dalam Negeri, Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (No.570/3727A/SJ, No.SE/08/M.PAN-RB/9/2010, N0.12 Tahun 2010)tentang Pelaksanaan Pelayanan penanaman Modal.

Berbagai terobosan menjadi ukuran Kinerja Pemerintah. Masyarakat saat ini kian memahami hak – haknyadan berani bersuara untuk menuntut jika mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai dengan yang di janjikan . Kondisi ini mendorong perlunya praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pelayanannya.

Peningkatan Kinerja Pelayanan adalah tugas yang harus dilaksanakan terus menerus maka Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango , berkomitmen untuk melaksanakan Pelayanan bermutu tinggi kepala investor dan masyarakat berdasarkan Standard Operasional Procedures (SOP) secara berkelanjutan untuk meningkatkan efektifitas,efisiensi, dan akuntabilitas Pelayanan

Publik sesuai dengan peratutaran perundang-undangan mengenai Pelayanan Publik.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan di hitung dan di ukur serta di gunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan ,tahap pelaksanaan maupun setelah tahap kegiatan selesai selesai dan berfungsi . Selain itu indikator kinerja di gunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari organisasi atau SKPD yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka dan atau menuju tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan.

Untuk mewujudkan Transaparasi dan Akuntabilitas maka Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja kabupaten Bone Bolango akan membuat laporan Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran berupa Keluaran kegiatan dan Indikator Kinerja masing – masing kegiatan. Ada Beberapa Indikator Kinerja yang sering dipergunakan dalam pengukuran kinerja organisasi yaitu :

1. Indikator masukan (Input) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa Dana, sumberdaya manusia , informasi Kebijaksanaan / Peraturan Perundang – undangan dsb.
2. Indikator Keluaran (Outout) adalah sesuatu yang di harapkan langsung di capai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.
3. Indikator Hasil (outcome) adalah sesuatu yang menggambarkan berfungsi keluaran kegiatan pada jangka menengah
4. Indikator Manfaat (benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

2.3	ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD
------------	--

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang di lakukan oleh Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja, Perubahan lingkungan strategis baik yang di pengaruhi oleh factor internal dan eksternal akan berdampak pada pelaksanaan peran Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja.

Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango dalam mengelola pelayanan perijinan yang berdampak pada belum tercapainya beberapa indikator pelayanan publik. Selanjutnya dalam rangka penilaian kelembagaan pelayanan publik, ukuran yang umum digunakan dalam penilaian pelayanan publik adalah merujuk pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 tahun 2010 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik. Berdasarkan isu tersebut, sasaran yang di harapkan adalah Meningkatnya kinerja Dinas Penanaman Modal, PTSP dan tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango dalam mengelola pelayanan publik dibidang perijinan Tahun 2016. Upaya untuk peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango akan sangat tergantung pada faktor yang ada didalam (internal) maupun faktor diluar (eksternal). Dalam mencermati potensi, aspek tinjauan yang perlu dilakukan adalah berbagai faktor kekuatan yang nampak dan yang tidak nampak tapi memungkinkan untuk didayagunakan menjadi faktor yang nyata (visible) melalui berbagai upaya. Pencermatan terhadap lingkungan internal organisasi menjadi fokus tinjauan, baik aspek legal keberadaan DPMPTSP&TK, kelembagaan / organisasi, tatalaksana, maupun sumber daya manusia (SDM) pegawainya.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan, Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang. Upaya untuk peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango dilakukan untuk

mengetahui faktor-faktor kekuatan dan kelemahan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja dalam rangka mengemban misi untuk mewujudkan visi dimasa depan. Pada bagian ini dikemukakan permasalahan - permasalahan pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten bone bolango beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada ***Tabel. 2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD dan Tabel 3. Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)***

2.4	REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
------------	--

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi subsatansi Renja Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam rancangan awal RKPD, Karena pada hakekatnya Renja SKPD tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, renja SKPD juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Hasil telaahaan terhadap Rancangan Awal RKPD dalam kaitannya dengan analisis kebutuhan Renja Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja disajikan Dalam ***Tabel 4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD***

2.5	PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
------------	--

Dalam menyusun Renja SKPD, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD.

Sebagai Salah Satu SKPD dalam lingkungan Pemerintah kabupaten Bone Bolango, Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan. Dalam kesempatan Musrenbang tahun 2016. Aspirasi masyarakat akan menjadi perhatian serius Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2017. Suatu langkah penting yang harus diambil adalah kembali menata dan menyusun berbagai peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja dapat dijalankan dengan tertib, terarah, efektif dan efisien. Berikut ini adalah tabel Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat :

Tabel 5.
Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

NO	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	JUMLAH DANA (Rp)	LEMBAGA ORGANISASI MASYARAKAT	KET
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN ,SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1	TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
------------	---

Berdasar undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 pasal 1 angka 13 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi juga berkaitan dengan pandangan jauh ke depan menyangkut kemana Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis. Visi memberikan gambaran atau pandangan tentang keadaan masa depan dengan memuat cita dan citra yang bersifat antisipatif, inovatif dan produktif yang ingin diwujudkan oleh Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja. Visi dirumuskan atas dasar pemahaman terhadap dinamika organisasi, cita, citra dan peran organisasi sehingga menimbulkan motivasi untuk meraihnya atau mewujudkannya.

Pernyataan Visi Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Naker adalah sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA PELAYANAN PERIZINAN YANG PRIMA
DALAM MENDUKUNG IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF”**

Penjelasan Visi :

1. Visi adalah cara pandang jauh kedepan atau cita-cita yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP&TK) dalam kurun waktu tertentu.
2. **Pelayanan Perizinan Prima** artinya Kemudahan dalam memberikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang prima, melalui 5 budaya kerja yaitu pelayanan cepat, mudah, ramah, bernilai dan beradab yang diwujudkan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas dan kerja tuntas dengan motto “Pelayanan Cemerlang”
Pelayanan Perizinan Prima yakni memberikan pelayanan perijinan secara terpadu dalam satu tempat yang berorientasi kepada konsumen yang dapat mencerminkan bentuk pelayanan prima yang memenuhi prinsip-prinsip pelayanan yaitu :
 - a. Kesederhanaan prosedur, pelayanan diselenggarakan dengan cara yang mudah, cepat dan tidak berbelit-belit.
 - b. Kejelasan dan kepastian, adanya kejelasan dan kepastian prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan baik teknis maupun administratif, unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan, rincian biaya dan jadwal waktu penyelesaian memiliki kepastian.

- c. Keamanan, dalam arti bahwa proses serta hasil pelayanan dapat memberikan keamanan dan kenyamanan serta dapat memberikan kepastian hukum.
- d. Keterbukaan, dalam arti prosedur/tatacara, persyaratan, tarif dan lainnya mudah diketahui dan difahami masyarakat, baik diminta maupun tidak.
- e. Efisien, persyaratan pelayanan dibatasi hanya pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan, dihindari pengulangan kelengkapan persyaratan.
- f. Ekonomis, dalam arti pengenaan biaya pelayanan ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan keadaan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Keadilan yang merata, jangkauan pelayanan diusahakan seluas mungkin dan diperlakukan secara adil.
- h. Ketepatan waktu, dalam arti pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.

Misi

Misi adalah Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi sebagaimana, Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dapat dirumuskan Misi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dibawah ini :

- a. Menciptakan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal yang berkualitas untuk meningkatkan realisasi investasi ;
- b. Menciptakan Tenaga Kerja yang terampil, Produktif dan transmigran yang berkualitas

Strategi

Strategi adalah cara atau langkah-langkah yang berisikan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Strategi yang digunakan dalam rencana ini adalah sesuai dengan hasil rumusan pertimbangan faktor internal dan faktor eksternal sebagai mana telah kami kemukakan yaitu :

- 1) Mengembangkan sumber daya serta sarana dan prasarana pelayanan untuk merespon kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.
- 2) Mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- 3) Meningkatkan kompetensi pegawai dalam rangka pelayanan perijinan melalui berbagai diklat baik di daerah maupun pusat.
- 4) Meningkatkan Pelayanan dengan menggunakan system Teknologi yang berbasis intranet dan Online.

- 5) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi, pendataan perijinan, kerjasama dan koordinasi lintas sektoral.
- 6) Menyusun rancangan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan Peraturan lainnya sebagai dasar pelaksanaan pelayanan Perizinan.
- 7) Mengembangkan kerjasama dengan Pihak ketiga dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
- 8) Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi SDA Aparatur pemerintah untuk mendukung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan

Kebijakan adalah arah dan tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan menjadi ketentuan yang telah disepakati, ditetapkan serta dijadikan pedoman, pegangan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Adapun kebijakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango adalah :

- 1) Membangun sistim dan mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan perijinan.
- 2) Mengembangkan sistim informasi perijinan berbasis teknologi informasi.
- 3) Meningkatkan dayaguna seluruh komponen internal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
- 4) Menyempurnakan sistim dan prosedur pelayanan perijinan dengan mengacu pada prinsip kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, kemudahan akses, kenyamanan, kewilayahan dan kedisiplinan serta keramahmatan pelaksana pelayanan.
- 5) Mengembangkan penyusunan basis data perizinan dan peningkatan kualitas pelayanan informasi perizinan.
- 6) Mengembangkan peningkatan dokumen, evaluasi dan pelaporan serta evaluasi kinerja dan keuangan yang akuntabel;
- 7) Penerapan standar pelayanan minimal dalam pelayanan perijinan dengan mengelola komplain dari masyarakat sebagai masukan dalam pelayanan perizinan;
- 8) Menciptakan jejaring kerja di bidang perijinan dengan memantapkan kerjasama antar *steakholder* yang terkait dengan perijinan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian hukum.

- 9) Mempersiapkan sumberdaya aparatur yang mempunyai kompetensi di bidang perijinan melalui diklat, bintek dan seminar pelayanan publik;
- 10) Ekstensifikasi, intensifikasi dan optimalisasi sumber dan kapasitas pendapatan daerah sektor perijinan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Tujuan merupakan Implementasi dari misi organisasi, Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi adalah hasil akhir yang akan di capai pada jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh unit - unit kerja dalam suatu organisasi . penetapan tujuan tidak mutlak harus di ukur atau kuantitatif namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan di capai di masa mendatang.

Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi . Fokus Utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu sasaran harus lebih fokus , bersifat spesifik, terinci dan dapat di ukur.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis tujuan mengarahkan perumusan strategis, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP TK) telah menetapkan tujuan yaitu :

1. Meningkatnya peluang Investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah ;
2. Mewujudkan Tenaga Kerja berkualitas, Produktif dan tersedianya perluasan, Penempatan Tenaga kerja

Untuk lebih jelasnya telah dirumuskan tujuan, sasaran Renja SKPD Mengacu pada Renstra DPMPTSP TK Kabupaten Bone Bolango pada ***Tabel 6. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD (Terlampir)***

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN DPMPTSP TK

Ada 9 (sembilan) Program dan 12 (dua Belas) kegiatan pada Dinas Penanaman Modal Peayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango sebagai berikut :

- 1. Program Pelayanan Penyediaan Adminstrasi Perkantoran**
 - a. Kegiatan Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran
 - b. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Keluar Daerah
- 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur**
 - a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - b. Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor
- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
- 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**
 - a. Pengembangan Potensi Unggulann Daerah
 - b. Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengemmdalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA
- 6. Program Peningkatan iklim Investasi dan Realisasi Investasi**
 - a. Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal
- 7. Program Peningkat Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja**
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja
- 8. Program Kesempatan Kerja**
 - a. Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat
- 9. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**
 - a. Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Detail Program dan Kegiatan dan Indikator Kinerja dapat dilihat Pada ***Tabel 7. Program dan Kegiatan SKPD tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 (Terlampir)***

BAB IV

PENUTUP

Demikian Revisi Rencana Kerja (RENJA) 2019 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja ini di sampaikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bone Bolango 2016 – 2021 dan Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 2016 – 2021.

Terkait dengan penyiapan dokumen perencanaan pembangunan ditingkat skpd, DPMPTSPTK telah menyusun Renstra DPMPTSPTK Kabupaten Bone Bolango 2016-2021 yang memuat visi, misi, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan 5 tahun kedepan sesuai dengan kewenangan, Tugas pokok dan fungsi DPMPTSPTK.

Renja Revisi Tahun 2019 ini di samping menggambarkan mengenai capaian Pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya guna sebagai acuan dalam Penyusunan Program dan kegiatan 2018. Keberhasilan pelaksanaan Renja DPMPTSPTK ini sangat bergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf DPMPTSPTK. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat dan kekuatan serta disiplin semua unsur DPMPTSPTK, melalui pemberian dukungan penuh terhadap pelaksanaannya serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Keberhasilan pelaksanaan Renja DPMPTSPTK juga tergantung kepada keseriusan segenap unsure DPMPTSPTK dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik segi tata kelola sumber daya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada akhir tahun anggaran berjalan, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Pada akhirnya keberadaan dari rencana Kerja ini menjadi salah satu alat mediator yang di kategorikan prime sistem di dalam struktur penyusunan anggaran Tahun 2019 serta mempunyai nilai ekonomis terhadap efisiensi laporan.

Hal hal yang di capai dengan baik tetap dipertahankan sementara program yang belum berjalan dengan baik perlu di lakukan penyempurnaan penyempurnaan di masa mendatang .

Demikianlah Revisi Rencana Kinerja ini dibuat dengan harapan penyajian sistematika ini dapat memberikan kontribusi masukan (input) terhadap kebijakan pemerintah, terutama Peningkatan pelayanan perijinan. Semoga mampu meningkatkan kinerja DPMPTSP&TK dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun yang akan datang.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN BONE BOLANGO**



DJUMAILDIL, AP.Mec.Dev
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19741018 199311 1 002

LAMPIRAN

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN TAHUN 2019
KABUPATEN BONE BOLANGO**

Nama
SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan		Rencana Tahun 2019			Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			JUMLAH				
1. 20. 1. 20. 14. 01	Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	Prosentase Cakupan layanan administrasi perkantoran yang berkualitas	DPMPTSP&TK	100%	Rp 563.776.000	DAU	
1. 20. 1. 20. 14. 01. 19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Jumlah Belanja Operasional Layanan Administrasi Perkantoran	DPMPTSP&TK	12 Bulan (Alat Listrik, Kebersihan Kantor, rekening Telepon, Rekening Listrik, Rekening Air, Surat Kabar, TV kabel/Internet/TV Satelit, Cetak dan Penggandaan, Makanan dan Minuman Rapat / Tamu, 12 Bulan (Honorarium PNSD,Honorarium Non PNSD)	450.930.000	DAU	
1. 20. 1. 20. 14. 01. 20	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar daerah yg diikuti	DPMPTSP&TK	12 Bulan (Rapat-rapat Koordinasi Kedalam daerah, Rapat-rapat Koordinasi Keluar daerah)	112.846.000	DAU	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1. 20. 1. 20. 14. 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan peruntukannya	DPMPTSP& TK	100%	Rp 229.180.000		
1. 20. 1. 20. 14. 02. 05	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas dan operasional lapangan	DPMPTSP& TK	16 Unit (Perawatan Kendaraan dinas)	97.080.000	DAU	
1.16.2 .24	Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor	DPMPTSP& TK	2 Unit Kendaraan Roda 4, 1 Paket Peralatan Kantor	132.100.000	DAU	
1.16.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase capaian ASN yang ditingkatkan kompetensinya	DPMPTSP& TK	100%	Rp 110.000.000		
1.16.5 .1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	DPMPTSP& TK	5 Kegiatan (Bimtek Keuangan, Bimtek Perencanaan, Bimtek E-Monev, Bimtek Kepegawaian, Bimtek LPPD)	110.000.000	DAU	
1.16.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang selesai tepat waktu	DPMPTSP& TK	100%	Rp 27.650.000	DAU	
1.16.6 .1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD yang disusun	DPMPTSP& TK	6 Dokumen (Renja, RKA, LPPD, Lakip, Laporan Capaian Kinerja)	27.650.000	DAU	

Lampiran Bab 4: Rincian Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014-Prakiraan Meja 2015

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1.16.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase nilai investasi awal	DPMPTSP&TK	100%	367.186.000,00		
		Persentase nilai realisasi		100%			
1.16.15.2	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Jlh pameran yang diikuti	DPMPTSP&TK	2 pameran	302.109.000	DAU	
		Jlh laporan pendataan potensi investasi		1 Laporan			
		jlh buku profil potensi investasi		1 Buku			
		Jlh pelaku usaha yang masuk		4 Dokumen			
		jlh data pelaku usaha		4Dokumen			
1.16.15.4	Koordinasi Antar Lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA	jlh data laporan LKPM	DPMPTSP&TK	4 Laporan	65.077.000	DAU	
		Jlh laporan realisasi PM		4 Laporan			
1.16.16	Program Peningkatan Iklim investasi dan realisasi investasi	persentase izin yang terbit berdasarkan NSPK	DPMPTSP&TK	100%	Rp 323.699.000		
1.16.16.6	Kegiatan : Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan	Jlh Izin yang lolos verifikasi	DPMPTSP&TK	1280izin	323.699.000	DAU	

Lampiran Bab V. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 Prakiraan Maju 2015

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
		Jlh izin yang terbit		1280izn			
		Jlh Website yang update		3Website dinas			
		Jlh data yang dikendalikan dan diawasi		3 Data			
		Jlh aduan yang diselesaikan		5 Aduan			
		Jlh izin yang disetujui oleh instansi terkini		1280izn			
1.14.1 5	Program : Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Prosentase peningkatan tenaga kerja yang dilatih dan telah memiliki sertifikat dan berkomptensi	100%		Rp 41.675.000		
1.14.1 5.06	Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Jlh hasil lap. Penyelenggaraan pelatihan	DPMPTSP&TK	2Dokumen	41.675.000	DAU	
		Jlh produktivitas TK yang ditingkatkan		120 Orang			
		Jlh TK yang berkompetensi		120 Orang			
		Jlh TK dilatih yang mendapatkan sertifikat		120 Orang			
1.14.1 6	Program : Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase peningkatan kesempatan kerja	100%		Rp 878.880.000		
1.14.1 6	Kegiatan : Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat	Jlh peserta bimtek kelompok usaha yang difasilitasi		130 Orang	878.880.000	DAU	

Lampiran Bab V. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 Prakiraan Maju 2015

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
		Jlh Dok KHL yang disusun		4 Dokumen			
		Jlh TK migran yg difasilitasi		2 Orang			
		Jlh TK formal informal yang ditempatkan		400 Orang			
		Jlh TK yang ditempatkan dlm sitem pelatihan berbasis masy.		100 Orang			
1.14.17	Program Perlindungan dan pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Prosentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan		65%	Rp 3.621.954.000		
		Persentase perusahaan yang membuat laporan ketenaga kerjaan					
1.14.17.05	Kegiatan : Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Jlh peserta yang mengikuti sosialisasi	DPMPTSP&TK	400 orang	3.621.954.000	DAU	
		Jlh TK formal informal yang dilindungi		20 Rb peserta BPJS			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
		Persentase Penyelesaian perselisihan HI		100%			
		Jlh TK & Perusahaan yg ikut sosialisasi ttg peraturan pelaksanaan ketenagakerjaan		100 Orang			
		Jlh perusahaan yg melaporkan perkembangan ketenagakerjaan		5 Laporan			
					6.164.000.000		

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN BONE BOLANGO



DIJUMAIL, AP.Mec.Dev
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19741018 199311 1 002

TABEL 4.
RKPD PERUBAHAN 2019
DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BONE BOLANGO

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					SETELAH PERUBAHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program dan Kegiatan Setiap SKPD					Program dan Kegiatan Setiap SKPD					
1,1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Prosentase Layanan Administrasi perkantoran			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Prosentase Layanan Administrasi perkantoran			
1	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran	DPMPTSP&TK	Jumlah Belanja Operasional Administrasi Perkantoran	12 Dokumen	465.893.000	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran	DPMPTSP&TK	Jumlah Belanja Operasional Administrasi Perkantoran	12 Dokumen	560.820.000	
2	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Keluar Daerah	DPMPTSP&TK	Jumlah Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar daerah yg diikuti	12 Bulan	75.998.000	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Keluar Daerah	DPMPTSP&TK	Jumlah Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar daerah yg diikuti	12 Bulan	112.846.000	
1,2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Prosentase Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kantor yang Memadai			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Prosentase Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kantor yang Memadai			
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	DPMPTSP&TK	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	15 unit	97.080.000,00	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	DPMPTSP&TK	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	15 unit	97.080.000,00	
1	Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Kantor	DPMPTSP&TK	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Kantor	8 Unit	189.975.000,00	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	DPMPTSP&TK	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Kantor	8 Unit	132.100.000,00	
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	DPMPTSP&TK	Prosentase Peningkatan Mutu SDM bagi Aparatur			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	DPMPTSP&TK	Prosentase Peningkatan Mutu SDM bagi Aparatur			
2	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	DPMPTSP&TK	Jumlah Aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	5 Orang	110.000.000,00	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	DPMPTSP&TK	Jumlah Aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	5 Orang	110.000,00	
1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	DPMPTSP&TK	Persentase Dokumen Perencanaan dan keuangan yang disusun tepat waktu			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	DPMPTSP&TK	Prosentase Peningkatan Mutu SDM bagi Aparatur			

2	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtsar realisasi kinerja SKPD	DPMPTSP&TK	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	6 Dokumen	27.660.000,00	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	DPMPTSP&TK	Jumlah Aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	6 Dokumen	27.650.000,00	
1,4	Program peningkatan promosi dan kerjasama Investasi		Prosentase Kegiatan Promosi dan Kerjasama			Program peningkatan promosi dan kerjasama Investasi		Persentase nilai investasi awal	100%		
								Persentase nilai realisasi	100%		
1,5	Kegiatan Koordinasi antar lembaga dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN / PMA	DPMPTSP&TK	Jumlah Investor yang hadir pada rapat koordinasi antara investor dan pemerintah	1 Kali Temu Investor	65.077.000,00	Kegiatan Koordinasi antar lembaga dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN / PMA	DPMPTSP&TK	Jlh data laporan LKPM	4 Laporan	65.077.000,00	
								Jlh laporan realisasi PM	4 Laporan		
2	Kegiatan Potensi unggulan Daerah	DPMPTSP&TK	Jumlah Promosi Potensi Unggulan Daerah yang dibuat	5 Investor	302.109.000,00	Kegiatan Potensi unggulan Daerah	DPMPTSP&TK	Jlh pameran yang diikuti	2 pameran	302.109.000,00	
								Jlh laporan pendataan potensi investasi	1 Laporan		
								Jlh buku profil potensi investasi	1 Buku		
								Jlh pelaku usaha yang masuk	4 Dokumen		
								Jlh data pelaku usaha	4Dokumen		
								Jlh data laporan LKPM	4 Laporan		
								Jlh laporan realisasi PM	4 Laporan		
	Program Peningkatan Iklim investasi dan realisasi investasi		Meningkatnya investasi daerah			Program Peningkatan Iklim investasi dan realisasi investasi		persentase izin yang terbit berdasarkan NSPK	100%		
	Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP&TK	Jumlah Izin Yang terbit	1300 Izin	323.699.000,00	Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP&TK	Jlh Izin yang lolos verifikasi	1280izin	323.699.000,00	
								Jlh izin yang terbit	1280izin		
								Jlh Website yang update	3Website dinas		
								Jlh data yang dikendalikan dan diawasi	3 Data		
								Jlh aduan yang diselesaikan	5 Aduan		
								Jlh izin yang disetujui oleh instansi terkini	1280izin		
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Ketja		Prosentase Pencari Kerja yang ditingkatkan kualitasnya			Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Ketja		Prosentase TK mandiri yang dilatih & telah memiliki sertifikat & berkompetensi	100%		

	Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	DPMPTSP&TK	Jumlah Tenaga Kerja yang terampil dan mandiri	15 Orang	41.675.000,00	Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	DPMPTSP&TK	Jlh hasil lap. Penyelenggaraan pelatihan	2Dokumen	41.675.000,00	
								Jlh produktivitas TK yang ditingkatkan	120 Orang		
								Jlh TK yang berkompetensi	120 Orang		
								Jlh TK dilatih yang mendapatkan sertifikat	120 Orang		
	Kegiatan : Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat	DPMPTSP&TK	Jumlah Peserta Bimtek Kelompok usaha Produktif dan yang difasilitasi	20 Orang	678.880.000,00	Kegiatan : Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat	DPMPTSP&TK	Jlh peserta bimtek kelompok usaha yang difasilitasi	100 Orang	878.880.000,00	
								Jlh Dok KHL yang disusun	3 Dokumen		
								Jlh TK migran yg difasilitasi	2 Orang		
								Jlh TK formal informal yang ditempatkan	400 Orang		
								Jlh TK yang ditempatkan dlm sitem pelatihan berbasis masy.	100 Orang		
	Program Perlindungan dan pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		Pronsetase Penyelesaian Kasus HI (Hubungan Industrial			Program Perlindungan dan pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		Prosentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	80%		
								Persentase perusahaan yang membuat laporan ketenaga kerjaan	100%		
	Kegiatan : Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	DPMPTSP&TK	Jumlah Perusahaan yang mengikuti sosialisasi tentang BPJS Ketenagakerjaan	8250 Orang	3.621.954.000	Kegiatan : Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	DPMPTSP&TK	Jlh peserta yang mengikuti sosialisasi	400 orang	3.621.954.000	

							Jlh TK formal informal yang dilindungi	20 Rb peserta BPJS		
							Persentase Penyelesaian perselisihan HI	100%		
							Jlh TK & Perusahaan yg ikut sosialisasi ttg peraturan pelaksanaan ketenagakerjaan	100 Orang		
							Jlh perusahaan yg melaporkan perkembangan ketenagakerjaan	5 Laporan		
	TOTAL				6.000.000.000,00				6.164.000.000,00	

PEMERINTAH KABUPATEN BONE-BOLANGO
TAHUN 2017

